

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Tugas : Merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi, serta Analisis Jabatan dan Kepegawaian.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi di bidang kelembagaan, tatalaksana dan reformasi birokrasi, dan anjab dan kepegawaian.
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, koordinasi fasilitasi, dan pengkajian di bidang Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
 - c. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan koordinasi, fasilitasi, dan pengkajian di bidang Anforjab dan Kepegawaian
 - d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi program di bidang kelembagaan, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi serta Anforjab dan Kepegawaian
 - e. Penyelenggaraan monitoring, dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kelembagaan, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi serta Anforjab dan Kepegawaian
 - f. Penyusunan laporan di bidang Kelembagaan, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi serta Anforjab dan Kepegawaian

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Alasan)
1	Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)	Persentase Perangkat Daerah tertata sesuai peraturan Perundang-undangan	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang tertata sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku x 100 % Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : Bagian Kelembagaan Alasan : Agar organisasi efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
2	Terwujudnya sistem pengelolaan kelembagaan ketatalaksanaan, kepegawaian dan kediklatan, mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai penentuan nilai jabatan	Persentase informasi jabatan sebagai pedoman penataan kepegawaian, ketatalaksanaan, kelembagaan dan pengawasan	Formulasi Pengukuran : Jumlah dokumen informasi jabatan yang tersusun x 100 % Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : Bagian Anforjab Alasan : Terlaksananya dan termanfaatkannya informasi jabatan
3	Meningkatnya tata kelola pengaduan pelayanan publik, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase penyelesaian tingkat aduan pelayanan publik	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah aduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah aduan}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Alasan : untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Alasan)
4	Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dengan meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi (LAKIP /LKjIP)	Formulasi Pengukuran : Jumlah dokumen LAKIP/LKjIP provinsi yang tersusun per tahun Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Alasan : Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mataram, 2017

KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. TADJUDDIN ERFANDY, M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19581129 198402 1 001